



Available Online at <http://fe.unp.ac.id/>
Book of Proceedings published by (c)

SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI (SNEMA) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
ISBN: 978-602-17129-5-5

SNEMA-2015
Padang-Indonesia.

Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup

Dewi Andriany

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
Telp.: 061 6619056, 6622400 Ext. 106 & 108 Fax. 061 6625474-6631003
Email : dewiunmu@yahoo.com

Abstract

Poverty and community empowerment lately become a strategic issue. The abundance of available resources on Indonesian soil, demanding to be developed utilization. But constrained by issues of utilization, funding and coaching. The purpose of this research is to create a model of empowerment of the poor, according to the regional potential and the ability of local tbsp so as to reduce poverty and create business opportunities. This research is expected to open up people's minds about independence and empowerment. This study uses a participatory approach with the consideration that the active involvement of research subjects is an important factor to determine the program that targeted, practically oriented, empowerment and. These results indicate that the model is a participatory approach appropriate for the Small Business community in the district of Medan Deli eligible to apply in Medan, should be integrated into the PNPM Mandiri Urban Program or the continuation of the program that is PPMBK

Keywords: poverty, community participation approach, empowerment

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan. Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Medan ditandai oleh kerentanan, rendahnya akses terhadap pelayanan publik, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Medan Deli merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai penduduk miskin yang jumlahnya banyak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Medan, 2010). Kecamatan Medan Deli memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 17.511 jiwa dengan 4015 kepala keluarga. Jumlah penduduk miskin terbanyak di kecamatan ini berada di kelurahan Tanjung Mulia yaitu sebanyak 3.856 jiwa atau terdiri dari 891 kepala keluarga sedangkan penduduk miskin terkecil berada di kelurahan kota bangun yaitu sebanyak 1350 jiwa atau terdiri dari 291 kepala keluarga.

Fokus utama pada daerah Medan Deli dengan jumlah penduduk terbanyak, dan juga kriteria pekerjaan berusaha sendiri cukup banyak, dengan asumsi bahwa mereka akan mudah diarahkan /diberdayakan. Dan juga dengan melihat banyaknya pelaku usaha kecil (berusaha sendiri) di Kecamatan Medan Deli.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007).

Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-cetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dari banyak pengalaman tentang pelaksanaan pembangunan yang dijumpai banyak pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan yang dikehendaki rakyat sebagai penikmat pembangunan tersebut.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentruman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara. Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil tangga partisipasi masyarakat di negara-negara yang kurang berkembang (*underdeveloped*), dapat dibagi menjadi 8 tingkatan yaitu : pemberdayaan (*empowerment*), kemitraan (*partnership*), mendamaikan (*conciliation*) dissimulasi/pura-pura (*dissimulation*), diplomasi (*diplomation*), Memberikan informasi (*informing*), konspirasi (*conspiration*), manajemen diri sendiri (*self management*).

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan. Dalam rumusannya mengenai konsep partisipasi Sastropetro (1988) juga merumuskan bentuk-bentuk partisipasi yang terdiri dari:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain rapat yang menentukan anggarannya.)
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi masa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

2.3 Hambatan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Mendorong agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan itu sendiri merupakan masalah yang masih perlu dicari permasalahannya. Mendorong dalam arti bukan memaksakan partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong masyarakat itu untuk berkorban. Pemerintah sekarang ini telah meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemerintah untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan langkah maju tetapi dalam pelaksanaan dilapangan pemerintah masih cukup banyak mengalami permasalahan dan hambatan.

Steinberg (1993) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program dan proyek-proyek maupun partisipasi atau prakarsa masyarakat sendiri mempunyai tantangan mencapai suatu gabungan atau kombinasi antara rencana-rencana pemerintah dan rencana masyarakat. Kok dan Elderbloem dalam Nampila (2005) dalam Rustiningsih (2002) serta Hana (2003) menguraikan ada beberapa kendala dalam mewujudkan pembangunan partisipatif, yaitu : Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi, Hambatan internal masyarakat sendiri, Hambatan karena kurang terkuasainya metode dan teknik partisipasi. Apabila tidak ada kesepakatan masyarakat terhadap kebutuhan dalam cara mewujudkan kebutuhan tersebut, serta apabila kebutuhan tersebut tidak langsung mempengaruhi kebutuhan mendasar anggota masyarakat.

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : (Puji Hardiyanti, 2006)

- a. Pertama kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.
- b. Kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan pengembangan ekonomi rakyat yang paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya peningkatan kemampuan sehingga menghasilkan nilai tambah setidaknya harus diadakan perbaikan akses, yaitu (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien, (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus menerus; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.
- c. Ketiga kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan pasar. Penyiapan penduduk bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang kita temui dimasyarakat seperti, anak tidak boleh sekolah, yang membicarakan rencana pembangunan desa hanya kaum laki-laki saja, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui dimasyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Lembaga-lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan kemampuannya saja.

2.4.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005 yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ; yaitu Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

2.4.2 Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “*bottom up*” lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan *bottom-up* memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

2.4.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

a. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

b. Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi

kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar

Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan pertimbangan bahwa pelibatan aktif subyek penelitian merupakan faktor yang penting untuk menentukan program yang tepat sasaran, berorientasi praktis, pemberdayaan dan berkelanjutan (Djohani dalam Poerwandari, 2005).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan pengumpulan data sekunder. Tahapan kegiatan pengambilan keputusan dalam Analisis Multi Kriteria (AMK), secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara tahap pertama dengan sejumlah stakeholder untuk memperoleh indikasi program yang akan diusulkan,
- b. Melakukan wawancara tahap kedua untuk menetapkan variable / kriteria,
- c. Melakukan wawancara tahap akhir dan hanya dilakukan dengan para pelaku usaha kecil untuk melakukan : Pembobotan dan skoring tiap program dengan memberikan penilaian terhadap variabel kriteria secara kualitatif ataupun kuantitatif.
- d. Mengidentifikasi alternatif program dengan menggunakan metoda Fishbone Diagram,
- e. Menetapkan program usulan, dengan cara :
 - Mengalikan bobot setiap kriteria dengan skor program pada kriteria tersebut,
 - Menjumlahkan nilai setiap kriteria sehingga didapat nilai total suatu program,
 - Me-ranking nilai tersebut sehingga didapat program prioritas.
- f. Indikasi program diperoleh dari hasil wawancara pendahuluan dengan sejumlah responden yang dianggap mewakili permasalahan pengembangan program bagi masyarakat miskin yakni pelaku usaha kecil, pengguna produk usaha kecil, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kec. Medan Deli, dan aparat Kecamatan Medan Deli.
- g. Kriteria / variabel diperoleh melalui proses FGD berikutnya dimana stakeholder hasil diskusi menghasilkan sejumlah kriteria, mulai dari yang paling penting sampai dengan kriteria yang tingkat kepentingannya paling rendah

Data penelitian akan dianalisis dengan secara deskriptif dengan menggunakan analisis multi kriteria

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Potensi Sumber Daya Ekonomi dan Manusia

Hasil survey menunjukkan bahwa paling tidak ada 30 jenis usaha di Kecamatan Deli yang saat ini berkembang. Sementara itu hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia (pelaku Usaha Kecil) menunjukkan sisi kelemahan yakni :

1. Kurang pengetahuan tentang pengemasan, promosi, pemasaran
2. Tidak memiliki akses yang baik kepada permodalan, pasar dan bahan baku

Tetapi pengalaman selama melakukan wawancara dengan para pelaku Usaha Kecil, satu hal yang pasti dapat dicatat bahwa mereka memiliki ***KEMAUAN KERAS UNTUK MAJU***, hanya tidak tahu bagaimana cara untuk maju.

Untuk itu diperlukan satu bentuk pemberdayaan yang bersifat partisipatif kepada para pelaku Usaha Kecil yang diintegrasikan kedalam Program PPMBK.(Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas). Apabila ingin dilakukan suatu prioritas, maka urutan usulan masyarakat diatas telah menunjukkan prioritas yang diinginkan.

4.2 Pemahaman Masyarakat Tentang Pemberdayaan

Sepanjang yang dapat dilihat selama proses wawancara, sejumlah hal yang dapat dicatat :

1. Masyarakat tahu bahwa ada program pemberdayaan dari pemerintah, dahulu melalui Program PNPM Mandiri dan saat ini melalui Program PPMBK (Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas).
2. Masyarakat tidak kritis dalam melihat bantuan yang diberikan, dalam arti tidak memahami bahwa satu program tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus simultan dengan program pemberdayaan lain. Sebagai contoh pada saat dilakukan pemberdayaan permodalan tanpa pemberdayaan aspek teknis dan SDM maka seluruh penerima manfaat tidak dapat mengembalikan bantuan permodalan tersebut.
3. Kepedulian masyarakat tentang nilai penting satu bentuk bantuan pemberdayaan kurang tinggi, padahal sebagai kelompok masyarakat marjinal berbagai bentuk bantuan pemberdayaan dari pemerintah atau pihak lain sangat dibutuhkan. Arti dari kepedulian yang rendah adalah masyarakat tidak berusaha menjaga kinerja pelaksanaan bantuan agar program tersebut dapat terus bergulir di Kecamatan Medan Deli. Ketiadaan program bantuan akan mengakibatkan melambatnya atau berhentinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat / Usaha Kecil.

Kata kunci dalam program pemberdayaan Usaha Kecil adalah bersifat partisipatif. Desain pemberdayaan yang bersifat partisipatif yang sudah berhasil selama ini Program PNPM Mandiri dan sekarang menjadi Program PPMBK. Jadi delapan program yang menjadi keinginan masyarakat yakni :

- a. Penyediaan Lembaga Pelatihan
- b. Penyediaan Lembaga Pemasaran
- c. Penyediaan Lembaga Promosi
- d. Penyediaan Lokasi Usaha
- e. Pengadaan Teknologi
- f. Penyediaan Lembaga Bantuan Modal (diintegrasikan dengan Program PNPM Mandiri Perkotaan yang dilanjutkan dengan Program PPMBK)
- g. Pengadaan Bahan Baku
- h. Lembaga Monitoring Kualitas

Pemberdayaan masyarakat miskin memiliki makna bagaimana agar kelompok masyarakat tersebut menjadi produktif sedemikian rupa sehingga ada perbaikan taraf hidup. Pendekatannya bukan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja formal melalui berbagai investasi usaha besar atau sebagai pegawai negeri sipil, tetapi dengan memberdayakan kemampuan produktif untuk masuk kedalam satu kegiatan usaha produktif sebagai pelaku Usaha Kecil.

Kelompok masyarakat tersebut merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Kota Medan. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing Usaha Kecil, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengusaha besar hanya 0,2% sedangkan Pengusaha Kecil, menengah dan koperasi mencapai 99,8%. Ini berarti jumlah usaha kecil, menengah dan koperasi mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Persoalannya kontribusi Usaha Kecil terhadap PDRB, hanya 39,8%, sedangkan usaha besar mencapai 60,2%.

Terhadap pertumbuhan ekonomi, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya memberikan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan usaha besar 83,6%. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya menguasai pangsa pasar sebesar 20% (80% oleh usaha besar). Hal tersebut menunjukkan dua sekaligus, yaitu super kuatnya sektor usaha besar dan teramat lemahnya sektor Usaha Kecil.

Harapannya adalah dengan meningkatnya produksi usaha kecil, juga menengah dan koperasi dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas daerah, atau sebesar 6-8% per tahun, maka akan ada daya serap tenaga kerja tetap yang sebesar pada usaha kecil, menengah dan koperasi, bersamaan dengan bertambahnya tenaga kerja, sebesar 5-10% per tahun.

Keberhasilan PNPM yang dilanjutkan menjadi PPMBK merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, disamping program penanggulangan kemiskinan yang lain. Jangkauan program ini sangat luas mencapai 63.000 desa (80%), 5.146 kecamatan, 394 kabupaten/kota, dan 33 propinsi. Total dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah untuk membiayai program ini selama 15 tahun lebih dari 70 trilyun.

Sebelumnya, PNPM Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri.

Tujuan dari program tersebut adalah :

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
- b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat;
- c. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMBK)/ adalah salah satu intervensi PNPM Mandiri Perkotaan untuk mencapai masyarakat mandiri. Prinsip dasar pengembangan dalam PPMBK adalah penguatan akses masyarakat miskin (KSM) kepada 5 asset sumber penghidupan masyarakat, yakni modal SDM, modal sosial, sumberdaya alam, sumberdaya fisik dan sumberdaya keuangan.

Tujuan PPMBK adalah menguatkan kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin. PPMBK ini merupakan program yang diperuntukan bagi KSM-KSM yang memiliki potensi usaha terutama dalam meningkatkan mata pencaharian keluarga. Kriteria KSM PPMBK ini adalah beranggotakan 5-10 orang yang 2/3 anggotanya terdaftar dalam PS-2 (daftar Warga Miskin), memiliki aturan main KSM dan sistem administrasi, memiliki Usaha Kecil yang berpotensi untuk dikembangkan, serta pernah mendapat pinjaman bergulir dari UPK atau Lembaga Keuangan lainnya dengan tingkat pengembalian lebih dari 90%.

Perbedaan PPMBK dengan pinjaman bergulir Reguler (yang biasa digulirkan oleh UPK) adalah, usaha yang dijalankan penerima PPMBK merupakan usaha pokok mata pencaharian keluarga. Sedangkan pinjaman bergulir reguler usahanya boleh mata pencaharian sampingan keluarga. Dan besar pinjaman PPMBK antara 3-5 juta rupiah per orang, sedangkan yang reguler besar pinjamannya hanya sampai 2 juta rupiah per orang.

Melihat kepada dua contoh, pertama adalah kegagalan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Medan Deli dan keberhasilan di tempat lain, diduga bahwa pelaksanaan PNPM Perkotaan di Kecamatan Medan Deli tidak komprehensif. Dalam arti tidak didukung oleh program lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan.

Artinya, tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan akan berhasil apabila diintegrasikan dengan kebutuhan riil masyarakat yakni :

- a. Peningkatan pengetahuan tentang pengemasan, promosi, pemasaran,
- b. Pembangunan akses yang baik kepada pasar dan bahan baku.

4.3 Model Pendekatan Partisipatif dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan untuk Memperbaiki Taraf Hidup

Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui strategi pemberdayaan total yang didalamnya mencakup adanya program perlindungan sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan sumberdaya manusia, dan pemberdayaan ekonomi produktif.

Pada tingkat pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat miskin secara bertahap terdiri dari kegiatan :

1. Membuka akses permodalan terhadap usaha mikro dengan melibatkan lembaga keuangan profesional sehingga pengelolaan dana tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat yaitu prinsip ekonomi pasar dengan tingkat bunga pasar.
2. Meningkatkan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
3. Menyiapkan, mengembangkan dan memberdayakan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
4. Menjalin kemitraan antara Usaha Kecil dengan program CSR dari sejumlah perusahaan-perusahaan besar.

Perluasan basis usaha dan kesempatan Usaha Kecil dengan mendorong tumbuhnya wirausaha baru, melalui peningkatan pengetahuan dan semangat kewirausahaan. Penguatan kelembagaan Usaha Kecil terutama untuk memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan- non perbankan, pemanfaatan teknologi dan pemasaran serta promosi produk. Hal simultan lain yang harus dilakukan adalah memperbaiki lingkungan usaha melalui penyerderhanaan prosedur perijinan.

Sehingga pengembangan Usaha Kecil akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan guna mendorong peningkatan pendapatan, pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pengembangan Usaha

Kecil sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Model pendekatan partisipatif yang sesuai bagi masyarakat pelaku Usaha Kecil di Kecamatan Medan Deli yang layak untuk diaplikasikan di Kota Medan, sebaiknya :

1. Diintegrasikan kedalam Program PNPM Mandiri Perkotaan atau kelanjutan Program tersebut yakni PPMBK
2. Aspek yang menjadi sasaran adalah :
 - a. Pengetahuan tentang pengemasan dan promosi,
 - b. Bantuan mendapatkan akses pemasaran, bahan baku dan permodalan
3. Hal yang harus ditumbuhkan dari pelaku Usaha Kecil adalah :
 - a. Motivasi kuat untuk terus berkembang
 - b. Tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan usaha yang berarti keberlangsungan program bantuan dari pemerintah atau pihak lain.

4.4 Pendekatan Partisipatif Tahap Pendahuluan

Dilakukan dua langkah identifikasi terhadap aspek internal dan eksternal dari pelaku Usaha Kecil. Aspek internal mencakup kualitas produk dan kemampuan manajerial. Tahap tahap ini harus dilakukan pengamatan langsung secara sekasama, tidak mengandalkan data sekunder atau wawancara saja. Aspek eksternal mencakup kemampuan pelaku Usaha Kecil dalam mencari akses kepada sumber bahan baku yang relatif murah agar harga produk dapat bersaing. Selain itu juga dilihat akses kepada pasar, apakah pelaku Usaha Kecil memang sudah memiliki akses kepada pasar atau hanya mengandalkan kedatangan pembeli saja tanpa ada upaya apapun.

Setelah aspek internal dan eksternal teridentifikasi, dilakukan analisis kebutuhan nyata. Artinya dalam melihat secara nyata, apa sebenarnya kebutuhan bagi para pelaku Usaha Kecil, apakah memang peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan manajerial, peningkatan akses kepada pasar, kemudahan memperoleh bahan baku, peningkatan promosi, introduksi teknologi, permodalan dan monitoring kualitas.

Analisis kebutuhan nyata tersebut dapat menggunakan tehnik wawancara dengan alat analisa : Analisa Hirarki Proses, atau Analisa Multi Kriteria, Analisa SWOT, dll, sepanjang dapat dijustifikasi secara baik kebutuhan yang secara nyata harus dipenuhi untuk para pelaku Usaha Kecil. Hasil dari deskripsi analisis kebutuhan nyata sangat menentukan desain pendampingan berikutnya. Desain dimaksud adalah tetap mengikuti alur yang sudah ditetapkan, hanya akan ditentukan berapa jumlah peserta pendampingan, berapa lama, dan berapa besar biaya pendampingan yang akan diinvestasikan.

4.5 Pendekatan Partisipatif Tahap I

Pada tahap pertama, dilakukan pendampingan peningkatan kemampuan teknis produksi sekaligus kemampuan manajerial pelaku Usaha Kecil sampai batas tertentu yang dianggap mulai berhasil.

Secara subjektif pihak pendamping harus menentukan tingkat keberhasilan tersebut, baik dengan cara membandingkan dengan produk sejenis di tempat lain atau memintah pendapat konsumen. Apabila pendampingan peningkatan kemampuan teknis dianggap sudah berhasil, maka akan diberikan insentif berupa pembukaan akses kepada sumber bahan baku yang lebih murah. Dalam hal ini pihak pendamping harus memiliki jaringan sumber bahan baku yang memang memiliki harga bersaing.

Pada tahap ini akan dilakukan pencairan bantuan permodalan tahap pertama. Pemberian bantuan permodalan yang berjenjang dan berstruktur untuk mengurangi resiko beban utang pelaku Usaha Kecil serta kelangsungan program itu sendiri. Setelah secara nyata telah terjadi transaksi bahan baku dengan sumber yang telah dicarikan, maka selanjutnya program pendampingan memasuki tahap kedua.

4.6 Pendekatan Partisipatif Tahap II

Pada tahap kedua dilakukan pemberian insentif berupa pembukaan akses kepada pasar. Bentuk insentif tersebut bisa dalam bentuk fasilitasi pembuatan kerjasama dengan jaringan pasar yang besar atau penempatan pada lokasi usaha yang lebih strategis dan menjangkau pasar dengan lebih mudah. Pada tahap kedua juga dilakukan pencairan bantuan permodalan tahap kedua.

Ukuran keberhasilan pendekatan partisipatif tahap kedua adalah manakala terjadi peningkatan produksi dan penjualan. Setelah mencapai kriteria tersebut, maka pendampingan dapat memasuki tahap terakhir, tahap ketiga.

4.7 Pendekatan Partisipatif Tahap III

Pada tahap terakhir dilakukan pemberian insentif berupa pendampingan pengadaan teknologi. Pertimbangannya adalah bahwa pelaku Usaha Kecil tersebut telah mampu menembus pasar dan memiliki akses kepada sumber baku sehingga dapat menghasilkan produk yang relatif dapat bersaing. Peningkatan proses

produksi melalui introduksi teknologi penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja yang telah didukung oleh kemampuan manajerial yang semakin baik. Pada tahap terakhir ini juga dilakukan pencairan bantuan permodalan tahap terakhir. Selama masa pendampingan tersebut dilakukan secara simultan baik untuk monitoring produk maupun kinerja pelaku Usaha Kecil dan pelaksanaan program itu sendiri.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- a. Sumber daya manusia pelaku Usaha Kecil di Kota Medan secara umum menunjukkan dua kelemahan yakni : (a) Kurang pengetahuan tentang pengemasan, promosi, pemasaran (b) Tidak memiliki akses yang baik kepada permodalan, pasar dan bahan baku
- b. Diperlukan intervensi dari Pemerintah Kota Medan untuk membantu lapisan masyarakat tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu diperlukan satu bentuk pemberdayaan yang bersifat partisipatif kepada para pelaku Usaha Kecil yang diintegrasikan kedalam Program PPMBK.
- c. Model pendekatan partisipatif yang sesuai bagi masyarakat Usaha Kecil di Kecamatan Medan Deli yang layak untuk diaplikasikan di Kota Medan, sebaiknya diintegrasikan kedalam Program PNPM Mandiri Perkotaan atau kelanjutan Program tersebut yakni PPMBK
- d. Ada Empat langkah pendekatan partisipatif yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat miskin di Kota Medan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Kecil, yakni : (a) **Pendekatan Partisipatif Tahap Pendahuluan**, Mencakup analisis aspek internal tentang kualitas produk dan kemampuan manajerial dan aspek eksternal mencakup kemampuan pelaku Usaha Kecil dalam mencari akses kepada sumber bahan baku dan akses kepada pasar. (b). **Pendekatan Partisipatif Tahap I** , Dilakukan pendampingan peningkatan kemampuan teknis produksi sekaligus kemampuan manajerial pelaku Usaha Kecil sampai batas tertentu yang dianggap mulai berhasil (c) **Pendekatan Partisipatif Tahap II** Dilakukan pemberian insentif berupa pembukaan akses kepada pasar. Pada tahap kedua juga dilakukan pencairan bantuan permodalan tahap kedua, apabila terjadi. (d) **Pendekatan Partisipatif Tahap III** , Dilakukan pemberian insentif berupa pendampingan pengadaan teknologi, agar dapat menghasilkan produk yang relatif dapat bersaing mengingat kemampuan manajerial semakin baik. Pada tahap terakhir ini juga dilakukan pencairan bantuan permodalan tahap terakhir.

5.2 Saran

- a. Perlu memberikan pelatihan bagi masyarakat miskin khususnya pelaku usaha kecil dalam hal manajemen (sdm, produksi, keuangan dan pemasaran)
- b. Perlu keterbukaan dari semua instansi terkait akan keberadaan dan potensi yang dimiliki usaha kecil dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin
- c. Perlu kemudahan akses dari instansi terkait untuk memberikan fasilitas yang diperlukan usaha kecil dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin

REFERENSI

- Agus Purbathin Hadi, *Revisi Mekanisme Dan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa Menuju Pembangunan Desa Yang Partisipatif Dan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah*, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram
- Analisis Multi Kriteria Sebagai Metode Pemilihan Suatu Alternatif Ruas Jalan di Propinsi Lampung, Rahayu Sulistyorini dan Dwi Herianto, *Jurnal Rekayasa* Vol. 14 No. 3, Desember 2010
- Artiningtias, 2012, Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat, Studi Kasus Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Asmara, Lalu Hajar., 2001, *Mencari Format Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif Untuk Mendukung Implementasi Otonomi Daerah*. Makalah diskusi internal Bapeda Lombok Tengah tanggal 10 April 2001.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1983, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Bryant, Coralie and White, G, Louise, 1989 *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, pengantar Dorodjatun Kuntjoro-jakti, Jakarta; LP3ES.
- Colletta, Nat J dan Umar Kayam. 1987. *Kebudayaan dan Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia. Pp.333.

- Hornby, Parnwell. Siswojo dan Siswojo. 1984. Kamus Inggris Indonesia. OxfordUniversity Press. P.419.
- Koentjoroningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- P3P UNRAM, 2001. *Studi Eksploratif Pengembangan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah*. Mataram : P3P UNRAMbekerjasama dengan BAPEDA Lombok Tengah, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
- Panduan Untuk Menerapkan Analisis Multi Kriteria dalam Menetapkan Kriteria dan Indikator, Guillermo A Mendoza and Phil Macoun, Center for International Forestry Research, Jakarta, 1999, SMK Grafika Mardi Yuana
- PNPM MANDIRI, 2007). *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*(
- Puji Hadiyanti, 2006, *Kemiskinan & Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 2, Nomor 1, Juni 2006
- Sastropetro, R.A Santoso (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni
- Sherry R. Arnstein (1969), *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 3
- Steinberg, Florian, Nana Rukmana D.W dkk (1993). *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta : LP3ES
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Stimulasi Pemerintah Dalam Rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa*, diktat IIP Jakarta..
- Syamsi, Ibnu, 1986, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan Pemrograman Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*, Rajawali, Jakarta
- UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Vidhyandika Moeljarto. 2000. *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program Inpres Desa Tertinggal*. Centre For Strategic And International Studies Jakarta
- Wahyuni , Sri dan M. Sukarja. 2000. *Kelembagaan Penunjang Acquisition System Teknologi Sistem Usahatani Pasang Surut*. Pros. Sem. Nas. Penelitian Pengembangan PertanianLahan Rawa, Cipayung 25 – 27 Juli. PUSLITBANGTAN – BOGOR. P 392 – 402.